Giddens, Dan Tertium Quid Dalam Demokrasi
Sebagai Jalan Ke-Tiga

Sebuah Telaah Epistemologis atas Logika Numeral dalam Sejarah Ideologi

I. Judul sebagai Arsitektur Epistemologis

Ketika Anthony Giddens menerbitkan *The Third Way* pada 1998, pemilihan judul itu bukan sekadar strategi retoris. Di balik frasa sederhana tersebut bekerja sebuah logika numeral yang menyimpan presuposisi mendalam: bahwa ada dua jalan sebelumnya yang tidak perlu disebutkan karena sudah hadir dalam memori kolektif pembaca. Inilah yang membuat judul itu epistemologis sebelum ia menjadi politis — ia bekerja melalui ketidakhadiran yang terstruktur, melalui dua rujukan yang sengaja dibisukan agar yang ketiga tampak sebagai resolusi.

Secara harfiah, 'jalan ketiga' adalah urutan. Namun secara implisit, ia adalah dualisme yang menyamar sebagai trilogi. Berbeda dari struktur trilogi sejati — di mana tiga *logos* berdiri otonom dan setara seperti dalam Logos-Ethos-Pathos Aristoteles atau tiga kelas jiwa dalam *Politeia* Plato — 'the third way' tidak memiliki ontologi mandiri. Ia eksis hanya dalam relasi negatif terhadap dua kutub yang mendahuluinya.

> *Ini bukan tiga hal yang setara; ini dua hal yang melahirkan satu posisi baru melalui negasi ganda. Ia adalah tertium quid — sesuatu yang ketiga yang mendefinisikan dirinya semata-mata melalui apa yang bukan dirinya.*

II. Konstelasi Tiga Kutub dalam Geopolitik Ideologi

Untuk memahami konteks sesungguhnya dari manuver Giddens, perlu dibentangkan peta ideologis yang melatarinya. Kutub pertama adalah sosialisme Soviet — sebuah kekuatan yang secara institusional telah runtuh sejak 1991, namun tetap eksis sebagai sumberdaya laten dalam memori kolektif dan struktur politik yang berpusat di Rusia. Yang runtuh adalah wadahnya; yang bertahan adalah gravitasinya. Sosialisme Soviet terus bekerja sebagai negasi aktif — mendefinisikan ruang dengan cara menarik segala sesuatu menjauh dari arsitektur liberal Barat.

Kutub kedua adalah liberalisme Amerika, yang eksis bukan dalam keutuhan melainkan dalam tegangan internal antara dua register yang tak bisa disembunyikan: register emansipatoris yang mengucapkan HAM, demokrasi, dan pasar bebas sebagai bahasa universal; dan register instrumentalis yang mengoperasikan sanksi, hegemoni dolar, dan intervensi militer di balik bahasa yang sama. Hipokrisi struktural ini bukan kelemahan aksidental — ia adalah fitur bawaan dari sebuah kekuatan yang harus menjustifikasi dominasinya dalam bahasa yang mengandung benih kritik terhadap dirinya sendiri.

Di sinilah kutub ketiga — yang Giddens coba isi — menemukan celahnya. UK, dengan warisan Fabian Society-nya, mengambil posisi sebagai engsel ideologis: tidak cukup kuat untuk menjadi hegemon, namun memiliki kematangan institusional untuk menjadi penengah. Fabianisme sebagai tradisi sosialisme gradual yang bekerja melalui institusi — bukan revolusi — memberikan Blair dan Giddens sebuah bahasa yang tidak menanggung dosa-dosa kedua kutub. Asia, sebagai juri yang disponsori negara-negara berkembang, menjadi saksi bisu atas drama tiga benua ini.

III. Parasitisme Tertium Quid — Dualisme yang Tidak Terselesaikan

Namun ada ironi mendasar dalam posisi ini. *The Third Way* Giddens, alih-alih melampaui dualisme yang ingin diatasi, justru membutuhkan dualisme itu untuk tetap hidup. Tanpa neoliberalisme Thatcherite dan sosialisme negara-kesejahteraan lama sebagai dua musuh yang tetap hadir, 'jalan ketiga' kehilangan seluruh definisinya. Ini yang membuat posisinya bersifat relasional, bukan substansial — ia tahu apa yang bukan dirinya jauh lebih kuat dari apa yang dirinya.

Dalam terminologi logika klasik, ini disebut *tertium quid* parasitik: sebuah posisi ketiga yang mengklaim melampaui dilema namun sesungguhnya bergantung pada dilema itu untuk eksis. Berbeda dari *via media* dalam tradisi retorika yang memiliki kandungan normatif sendiri, Giddens menawarkan manuver posisional yang lebih dekat ke teknokrasi pengelolaan ketimbang visi transformatif.

> *The Third Way adalah identitas relasional, bukan substansial. Ia mengelola kekuasaan yang ada, bukan mempertanyakan legitimasi kekuasaan itu sendiri.*

IV. Trinitas sebagai Third Way yang Gagal Secara Sosial

Menariknya, logika yang sama pernah bekerja jauh lebih awal dalam sejarah — dan mengalami kegagalan yang lebih telanjang. Yesus dari Nazaret muncul dalam konteks krisis sosial-politik komunitas Yahudi pasca-kehancuran Bait Suci, di antara dua kutub yang membelenggu: kolaborasi dengan Roma di satu sisi, perlawanan bersenjata Zelot di sisi lain. Kabar dari Nazareth adalah mosi untuk keluar dari logika kekuasaan itu sendiri — bukan memilih salah satu kutub, bukan menjadi sintesis keduanya.

Namun kemudian terjadi apa yang bisa disebut institusionalisasi yang mengkhianati pesan: Konsili Nicea, Konsili Kalsedon, dan seterusnya. Doktrin mengambil alih transformasi. Trinitas yang seharusnya menjadi jalan keluar dari polemik kekuasaan justru menjadi senjata dalam perebutan kekuasaan teologis-politis Kekaisaran Romawi. Pesan sosial Bani Israil yang ternodai oleh perdebatan diskursif dan bias narasi kematian Isa al-Masih menjadi preseden historis betapa sebuah resolusi yang otentik bisa disubversi oleh institusi yang mengelolanya.

V. Islam sebagai Mosi Keempat — Negasi yang Melampaui Urutan

Dalam kerangka ini, kemunculan Islam pada abad ke-7 Masehi membacakan logika yang berbeda secara fundamental. Jika Giddens menawarkan posisi ketiga yang masih berada dalam urutan, Islam — dalam dimensi teologis dan sosialnya — muncul sebagai apa yang bisa disebut mosi keempat: sebuah negasi atas tiga yang mendahuluinya (Yudaisme sebagai sistem hukum, Kekristenan sebagai teologi keselamatan, Paganisme sebagai kosmologi kekuasaan politeistik) namun dengan cara yang tidak mendefinisikan dirinya sebagai nomor urut.

Tauhid bukan 'keempat' dalam hierarki numeris — ia adalah reset total terhadap logika numerasi itu sendiri. Dengan mengajukan Esa sebagai prinsip, Islam tidak membangun identitas relasional melainkan identitas substansial: satu sistem integral yang tidak membutuhkan musuh untuk bermakna. Ini yang membedakannya secara epistemologis dari *tertium quid* Giddens.

Lebih dari itu, Islam hadir pada momen dekadensi yang mencapai puncak klimaksnya — di mana penguburan bayi perempuan hidup-hidup bukan merupakan kekejaman individual melainkan produk rasional dari sistem sosial-ekonomi yang menjadikan perempuan sebagai beban dalam tatanan kabilah yang terus berperang. Kisah Umar bin Khattab yang menangisi anak perempuannya yang dikubur sendiri adalah bukti paling tragis bahwa destruktifikasi sosial bekerja bukan melalui kejahatan personal melainkan melalui struktur yang menormalisasi pengorbanan yang paling rentan.

> *Sosialisme tetap merupakan fakta ontologis bagi relasi struktural dalam politik. Liberalisme tetap merupakan sarana kebebasan dalam menyoal hajat kebutuhan yang termanipulasi kekuasaan. Tauhid melampaui keduanya bukan dengan meniadakannya, melainkan dengan menempatkan keadilan sebagai pusat ukuran — bukan kekuasaan, bukan ideologi, melainkan al-adl sebagai standar yang melampaui kepentingan klan maupun rezim.*

VI. Empat Komponen Progresif sebagai Metodologi Sosial

Resolusi yang dibawa Islam bukan sekadar teologis — ia adalah metodologi sosial yang konkret. *Al-ishlah* sebagai kritik terhadap status quo yang destruktif; *tabayun* sebagai epistemologi anti-manipulasi narasi, sebuah protokol klarifikasi yang mendahului keputusan kolektif; *musyawarah* sebagai legitimasi yang berakar pada deliberasi, bukan otoritas tunggal; dan *al-adl* sebagai standar struktural yang melampaui kepentingan klan. Keempat komponen ini bukan nilai abstrak — mereka adalah respons konkret terhadap patologi sosial yang spesifik.

Dalam konteks inilah pertanyaan tentang relevansi Giddens menemukan jawabannya. *The Third Way* adalah catatan yang diperbarui dari motif sosiologis yang lama: kelas intelektual organik kekuasaan menawarkan bahasa baru untuk mempertahankan arsitektur lama ketika sistem mulai retak. Perbedaan mendasarnya dengan momen kemunculan Islam adalah bahwa Giddens tidak mempertanyakan legitimasi kekuasaan itu sendiri — ia hanya mengelolanya dengan lebih elegan.

VII. Krisis Kepercayaan dan Pertaruhan Resolusi

Di penghujung analisis ini, pertanyaan yang paling berat tetap terbuka: apakah kabar dari Nazareth, atau pesan dari Mekah, masih merupakan resolusi yang logis untuk krisis kepercayaan saat ini? Risiko *refrain* pada masa lalu adalah nyata — setiap kali agama diajukan sebagai solusi sosial-politik, ia menghadapi dua bahaya: institusionalisasi yang mengulang patologi yang ingin diatasi, atau nostalgia historis yang menggantikan visi dengan pelarian.

Namun ada yang tersisa dari keduanya yang tidak tereduksi oleh institusi maupun nostalgia: keberanian untuk menempatkan yang paling rentan sebagai pusat ukuran keadilan sosial. Bayi perempuan yang dikubur, pemungut cukai yang dijauhi, budak yang dibebaskan — mereka adalah parameter etis yang tidak bergantung pada rezim untuk berlaku.

Dalam bahasa yang lebih kontemporer: bukan sistem teologis yang perlu diulang, melainkan orientasi etisnya. Dan di situlah, di antara krisis kepercayaan yang mengubur harapan keluarga yang utuh dan destruktifikasi terstruktur dari interaksi kekuasaan yang kacau, baik Nazareth maupun Mekah masih berbicara — bukan sebagai jalan ketiga, bukan sebagai *tertium quid* yang parasitik, melainkan sebagai undangan untuk keluar dari logika kekuasaan

itu sendiri.

■

Bandar Lampung, 2026